

**Nomor** : 01/NF/VII/2025  
**Perihal** : Permohonan Rekomendasi Untuk Relokasi Unit Kerja  
ASN PPPK Guru Bagi Suami Yang Telah Disetujui  
Namun Tak Kunjung Realisasi  
**Lampiran** : 1 (Satu) Bundel

Jakarta, 21 Juli 2025

**Yth.**  
**Wakil Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia**  
**Bapak Gibran Rakabuming**  
**Di**  
**Jakarta**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera, Shalom, Om Swastyastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan,*

Dengan hormat,

Salam hormat kepada Bapak Wakil Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia, izinkan kami (saya):

Nama : Nesya Ferlani  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Status : Warga Masyarakat  
Nomor Kontak : 087873662367  
NIK : 3173025802920008  
Domisili : Jalan Caringin, Pesona Prima Karanggan, D6/5, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat

Sebagai istri dari ASN PPPK Guru Provinsi DKI Jakarta, yang bernama:

Nama : Ady Lesmana [PPPK Provinsi DKI Jakarta] dan Nesya Ferlani [Istri PPPK]  
Pekerjaan : Guru PPPK Provinsi DKI Jakarta, NI PPPK 198011142022211006  
Status : Warga Masyarakat  
Nomor Kontak : 082132080035  
NIK : 3201031411800005  
Handphone : 082132080035  
Domisili : Jalan Caringin, Pesona Prima Karanggan, D6/5, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat

Memohon pada Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming, untuk mendapat izin dan rekomendasi kedinasan, terkait relokasi unit kerja PPPK, dari suami, yang mana prosesnya tersebut telah diajukan secara berjenjang dimulai dari Pimpinan Unit Kerja (Kepala SMPN 2985 Jakarta), Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi hingga tingkat Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, juga pada Kementerian Pendidikan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia, yang mana proses ini telah memenuhi aspek formatif dan normatif untuk memperoleh izin relokasi berupa SK Relokasi penempatan di tempat yang dijanjikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, sesuai formasi kebutuhan yang ada. Adapun detail rincian kronologi maupun proses yang telah berjalan adalah sebagai berikut, berdasarkan:

1. Surat permohonan relokasi unit kerja dari suami kepada satuan pendidikan SMPN 285 Jakarta, pada 03 Oktober 2022.
2. Surat nomor 309/PK.01.02, permohonan dari unit kerja SMPN 285 Jakarta, Kepulauan Seribu kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

3. Surat nomor 4511/KG.13.01, permohonan dari Sudin Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
4. Surat nomor 707/KG.13.01, permohonan dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta kepada PJ Gubernur DKI Jakarta, Up. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta,
5. Surat nomor e-0273/KG.02.00, permohonan dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta pada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dna Teknologi Republik Indonesia.
6. Surat nomor, 2645/B1/GT.00.00/2024, Tanggapan dari Dirjen GTK, Kemdikbud RI terkait perpindahan dapat dilakukan
7. Surat nomor, e-0274/KG.02.00, permohonan dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta pada Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia.
8. Audiensi dengan PB PGRI, dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2024, yang diterima oleh Wasekjen PB PGRI Bapak Didih Hartaya, dengan hasil secara prinsip mendukung, dan berkomunikasi dengan Dinas dan BKD
9. Audiensi dengan PJ Gubernur DKI Jakarta, diwakili oleh BKD Provinsi DKI Jakarta, dilaksanakan pada 5 Juli 2024 di Ruang RR2 Gedung BKD Provinsi DKI Jakarta, dengan hasil mendukung dan menanti surat jawaban dari Kemenpan.
10. Audiensi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, diwakili PIC PPPK Kemenpan RB, pada 5 Juli 2024, dengan hasil positif untuk membantu proses relokasi, dan telah dikomunikasikan secara langsung pada pihak Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dan memberikan arahan perbaikan redaksi surat dari BKD Provinsi DKI Jakarta untuk pemindahan formasi ke Disdik dan sesuai kebutuhan, hal ini dilakukan di ruang Kemenpan RB, Lantai 1.

Permohonan relokasi unit kerja ini, telah kami mohonkan, atas dasar pertimbangan Lokasi Unit Kerja yang sangat jauh dari tempat tinggal, berjarak kurang lebih 100 kilometer dan melalui laut, yakni di Kepulauan 1000, sedangkan kami bertempat tinggal di daerah Gunung Putri Bogor, sehingga kami kesulitan untuk menempuh perjalanan ataupun bila harus pindah tempat tinggal dikarenakan diantaranya:

1. **Faktor Orang tua suami dengan usianya yang senja, kelahiran Tahun 1954 (ayahanda) dan (ibunda) 1956, dalam kondisi sakit**, dimana ayah baru keluar dari rawat inap RS Annisa dari tanggal 5 s.d 14 Juni 2024, kemudian 17-20 Januari 2025, karena paru-paru, syaraf dan jantung. Bahkan pada akhirnya kini Ayahanda pun telah tiada (meninggal) dan berpulang pada 21 Januari 2025. Selama suami bertugas di Kepulauan 1000, orang tua (ayah) yang mengantar anak-anak kami ke sekolah dengan kendaraan motor dan pernah terjatuh dari kendaraan. Kondisi Ibu dari suamipun memerlukan perawatan karena tulang pinggangnya retak saat mengangkat aqua galon. Usia dan kondisi orang tua ini menjadi pertimbangan, karena keduanya harus dijaga dan dirawat, yang manakala sewaktu-waktu membutuhkan, **apalagi suami adalah anak tunggal sat-satunya, yang tak mempunyai saudara, demikian juga dengan saudara ibundanya**. Kini dengan meninggalnya ayah, menyisakan kondisi Ibu juga memerlukan perawatan, jarak rumah kami dengan orang tua terpaut jarak sekitar 5 (lima) kilometer dari Gunung Putri ke Citereup, saat ini Ibu tinggal sendirian di rumahnya tersebut.
2. **Faktor kedua adalah anak-anak kami sebanyak 4 orang masih berusia di rentang 4-12 tahun.** membutuhkan perhatian, pendampingan yang tidak bisa ditangani oleh istri seorang diri. 1 belum sekolah, 2 Sekolah Dasar dan 1 baru masuk SMP.
3. **Faktor ketiga, kesehatan suami untuk melakukan perjalanan jauh dari Bogor-Kepulauan 1000, tidak mendukung**, hal ini berdasarkan surat dokter dari RS Swasta dan RS Pemerintah, yang dikeluarkan berjenjang dari Faskes tingkat 1, Klinik Pelita Sehat, RS Annisa, RS Sentra Medika, RSCM dan RS Pemerintah Ridwan Meureksa, RS Adhyaksa Jakarta dan RS PON Jarta dengan kondisi *multiple HNP Cervical dan Lumbal serta fibromyalgia*, dimana menyebabkan rasa sakit menjalar dari belikat, lengan, pinggang hingga kaki, dan kondisi ini menyebabkan kesemutan, kram, kebas dan mati rasa, kehilangan keseimbangan tubuh dan terjatuh sewaktu-waktu. Sebagai catatan saat bekerja di Kepulauan 1000 pernah terjatuh dan dirawat di Puskesmas setempat. Kondisi ini memerlukan tindakan medik maupun terapi untuk pemulihan dan

membutuhkan waktu, hasil terakhir dari RS Adhyaksa ada indikasi auto imun. Suamipun juga vegetarian dan mempunyai alergetik terhadap makanan laut ataupun amis juga tidak dapat diterima tubuh, sedangkan di lokasi kerja, sulit untuk makanan non vegetarian. Penempatan unit kerjanya di Pulau Seribu tidak memiliki fasilitas kesehatan memadai, hanya ada 1 PUSKESMAS.

4. **Tidak efektif dan efisiennya dalam menempuh perjalanan ke lokasi unit kerja yang jauh dari rumah sekitar ± 100 KM, untuk mencapai lokasi dan membutuhkan perjalanan sekitar ± 7 jam perjalanan dari rumah ke lokasi kerja**, dengan cara:
  - menggunakan moda ojek online dari rumah ke Stasiun Nambo/Cibinong ( $\pm$  50 menit),
  - menggunakan moda kereta api dari stasiun Nambo/Cibinong dengan transit sebanyak tiga kali, Stasiun Nambo/Cibinong – Stasiun Manggarai ( $\pm$  1.2 jam) dan Stasiun Manggarai – Stasiun Duri ( $\pm$  45 menit). Kemudian melanjutkan Stasiun Duri – Stasiun Tangerang Kota ( $\pm$  45 menit), belum termasuk jeda waktu menunggu kereta
  - Selanjutnya dua kali moda angkutan umum (Angkot) dari Stasiun Tangerang Kota ke Pasar Kemis ( $\pm$  1 jam) dan Pasar Kemis ke Pelabuhan Tanjung Pasir ( $\pm$  45 menit).
  - Perjalanan kapal kayu penyeberangan dari Tanjung Pasir ke Pulau Untung Jawa ( $\pm$  45 menit).
  - Semua moda tersebut juga mempunyai waktu tertentu untuk jam keberangkatan, sehingga bukan sarana transportasi yang mudah untuk digunakan untuk mencapai lokasi kerja, terlebih dengan kondisi kesehatan yang saat ini sedang dialami. Keberangkatan dari rumah pun harus Minggu Pagi dari rumah untuk dapat sampai sore di lokasi dan Pulang Jumat sore dari lokasi dan sampai rumah sudah mendekati tengah malam, kondisi kereta pun penuh sesak dan harus melalui naik turun transit berulang kali. Hal ini merupakan kondisi yang sangat-sangat menyulitkan.
5. Faktor penghasilan, dengan ditempatkannya di Pulau 1000, tentunya memerlukan biaya yang besar untuk biaya sewa rumah di Pulau 1000, biaya listrik, biaya perjalanan Bogor-Jakarta pp setiap Minggu, biaya kehidupan selama di Pulau Seribu dan biaya lain-lain yang tidak sebanding untuk kehidupan keluarga, anak-anak biaya sekolah di Bogor juga memerlukan biaya. Sungguh sangat tidak efisien seperti bekerja tanpa hasil. Terlepas dari pengabdian dan pelayanan maupun nasionalisme terhadap masyarakat, bangsa dan negara.
6. Selanjutnya, faktor lain adalah di unit kerja, pada saat sumi saya masuk tahun 2022 terdapat dua orang guru, diantaranya adalah guru honorer yang merupakan penduduk asli daerah, dan 1 PPPK yang belum PPG dan mengampu bidang studi yang sama dengan suami saya (Guru IPS), kini keduanya telah diangkat sebagai PPPK dan lulus PPG, sehingga terdapat 3 guru dan terjadi kelebihan guru dibidang yang saya ampu. Dari jumlah peserta didik dan skala sekolah, kebutuhan guru, cukup 1 orang untuk mengampu bidang tersebut. **Faktor ini juga berpengaruh terhadap sertifikasi pendidik dan kebutuhan jam mengajar, tercatat sudah Tunjangan Profesi Guru tidak tercairkan selama 1 tahun, dikarena jam mengajar suami saya tidak sesuai bidang yang diampu, dengan adanya kelebihan guru yang bersertifikasi profesi dengan bidang yang sama dengan suami saya, maka dicatatkan pada sistem dapodik di bidang lain yakni bidang TIK.** Tentunya ini menyebabkan Tunjangan Profesi Guru juga tidak diterima.

Permohonan dan pertimbangan yang kami mohonkan, telah berproses sangat lama yang mana seharusnya telah memenuhi unsur normatif dan formatif, dan secara prinsip telah disetujui dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia secara tertulis dan secara lisan oleh Kemenpan RB pasca audiensi tanggal 05 Juli 2024, namun hingga surat terbuka permohonan rekomendasi ini kami mohonkan kepada Bapak Wakil Presiden, masih belum ada titik kejelasan. Dengan kondisi tersebut, kami memohon rekomendasi kedinasan/nota dinas pada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, untuk arahan, kebijakan dan kebijaksanaan terhadap apa yang kami alami. Sebagai catatan, apa yang saya alami ini, tidak hanya saya saja, namun masih ada rekan-rekan lain dengan kondisi serupa yang memerlukan kebijakan Bapak. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia bersama jajaran, dengan kerendahan hati saya memohon kebijakan dan kebijaksanaan dari Bapak dan jajaran untuk dapat merelokasi suami saya ke unit kerja lain di daratan, sesuai yang telah disampaikan sebelumnya oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, terutama mendekati tempat tinggal. Suami saya bersedia ditempatkan untuk mengajar di Sekolah Rakyat, dan sekolah lain sesuai arahan dan rekomendasi dari Bapak Wakil

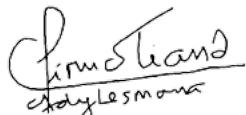
Presiden. Adapun Portofolio dedikasi pengabdian hidupnya pada masyarakat pendidikan dan pemerintah sepanjang hidup dar suami saya kebelakang telah mewarnai skala nasional, semoga juga menjadi pertimbangan dari Bapak Wakil Presiden dan jajaran. Berikut seklumit portofolio dan dedikasinya pada pendidikan terangkum dalam sistem pembelajaran berbasis digital yang dikembangkan secara mandiri dengan biaya mandiri, terlampir: <https://www.guruips-smrn285jkt.site/kelas-digital-ips/>

Atas perhatian Bapak Wakil Presiden dan segenap jajaran, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon rekomendasi kedinasan dari Bapak Wakil Presiden dan jajaran Setwapres. Sehat selalu untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta segenap jajaran pemimpin lembaga yang telah membawa negeri ini kearah yang lebih baik. ***Indonesia Hebat, Jayalah Negeriku dan Tumpah Darahku!***

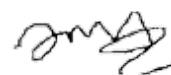
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera, Shalom, Om Santi Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Salam kebajikan,*

Hormat Kami  
Pemohon

PPPK Guru Provinsi DKI Jakarta

  
(Ady Lesmana)

Istri PPPK

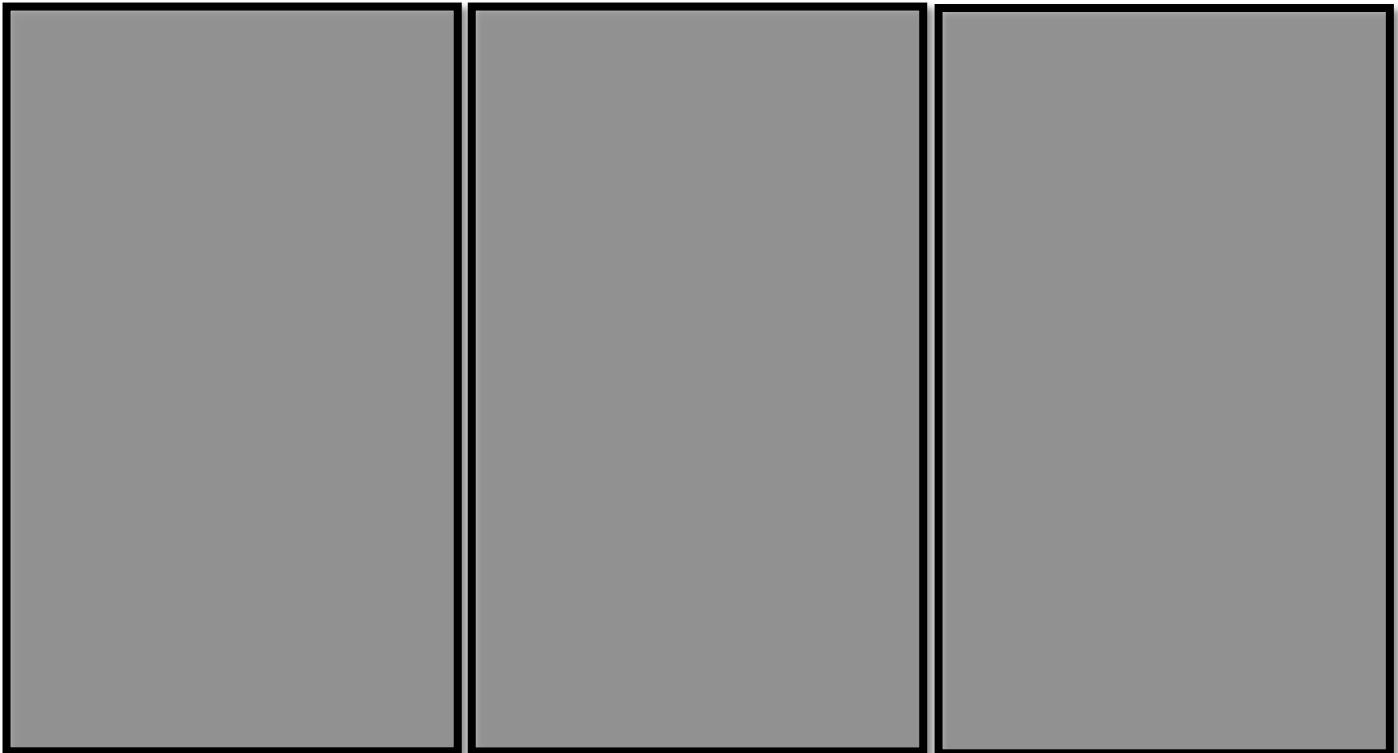


(Nesya Ferlani)

Lampiran Surat: 01/NF/VII/2025

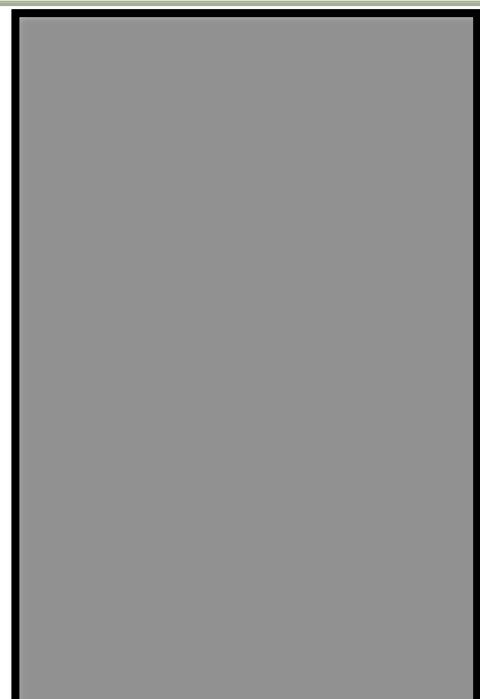
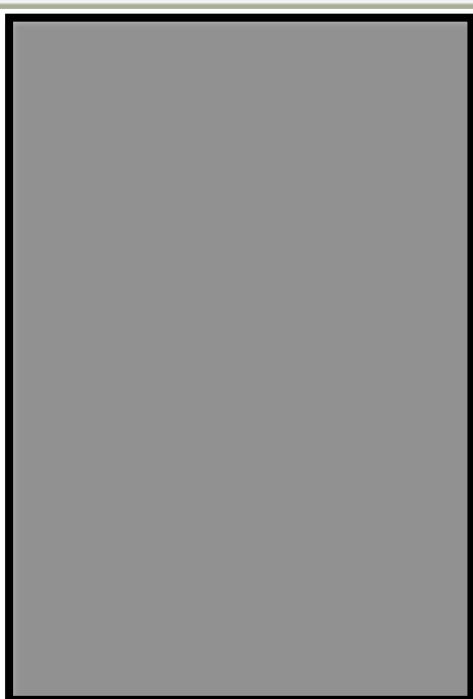
**PROSES UPAYA PERMOHONAN BERJENJANG YANG TELAH BERJALAN**

**Bagian 1**  
**Permohonan Relokasi Pada Pimpinan Unit Kerja**  
**(Kepala Sekolah) Kepulauan 1000.**



**Bagian 2**  
**Permohonan Pimpinan Unit Kerja Ke Dinas**  
**Pendidikan Kabupaten Kepulauan 1000.**

**Bagian 3**  
**Permohonan Dinas Pendidikan Kabupaten**  
**Kepulauan 1000 Ke Dinas Pendidikan Provinsi**  
**DKI Jakarta**



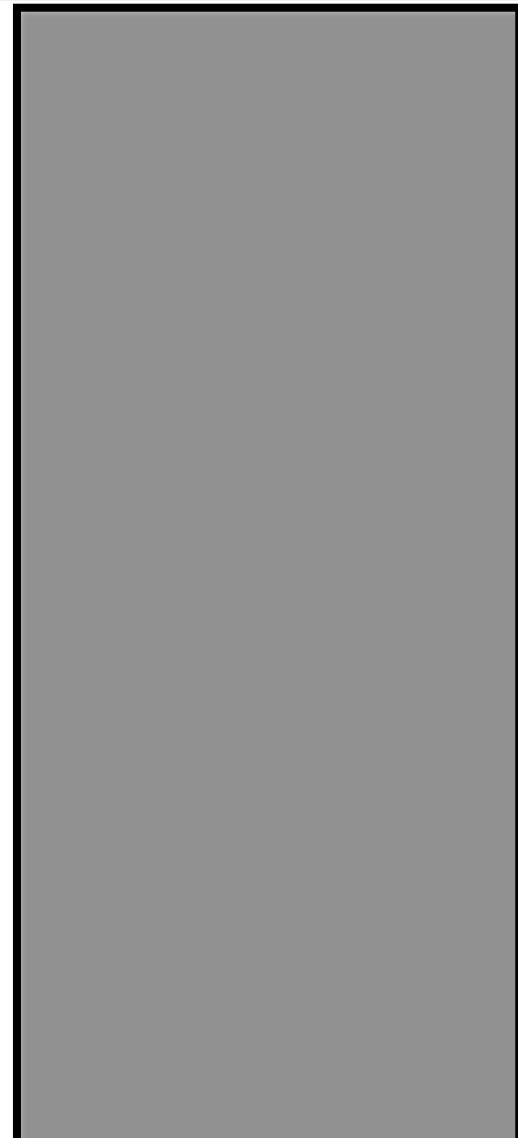
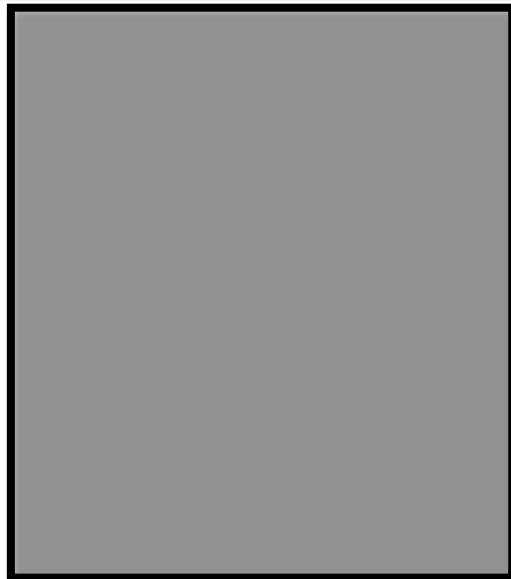
**Bagian 4**  
**Permohonan Dinas Pendidikan Provinsi DKI**  
**Jakarta Ke Badan Kepegawaian Daerah. Provinsi**  
**DKI Jakarta**

**Bagian 5**  
**Permohonan Badan Kepegawaian Daerah.**  
**Provinsi DKI Jakarta Ke Kementerian Pendidikan**  
**Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI**

 <b>PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b> Jl. Medan Merdeka Selatan No. 12, RT.001/RW.003, 10200, Jakarta Pusat Faksimile (021) 3822033, 3822633 Website : <a href="http://bkkdi.jakarta.go.id">http://bkkdi.jakarta.go.id</a> Email: <a href="mailto:bkkdi@jakarta.go.id">bkkdi@jakarta.go.id</a> <b>JAKARTA</b> Kode Pos : 10110													
Nomor : e-0273AKG 02.00 Sifat : Separa Lampiran : 1 (satu) berkas Hal : Permohonan izin perpindahan unit kerja bagi PPPK	Tgl : 19 Februari 2024 Kepada Yth. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia @ Jakarta  Sehubungan dengan evaluasi pelayanan PPPK dan optimisasi kinerja PPPK di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, saya sampaikan hal sebagai berikut: 1. Berdasarkan surat keterangan dokter dari RS. Bina Husada Cibinong dijelaskan bahwa PPPK atas nama Ady Lesmana saat ini sedang menjalankan perawatan rutin di RS. Bina Husada Cibinong dengan vonis/rekomendasi dokter yaitu streptokokus dan Low Back Pain sehingga mengalami kesulitan aksesibilitas apabila ditempatkan di SMPN 285 Kecamatan Keputulan Seribu Utara Kepulauan Seribu. 2. Selanjutnya PPPK atas nama Fajar Risdyanto merupakan PPPK Disabilitas Tuna Netra yang akan lebih optimal kinerjanya jika ditempatkan pada Sekolah Luar Biasa (SLB). 3. Berdasarkan analisa beban kerja masih terdapat kebutuhan jabatan Guru IPS pada SMP Negeri 91 Jakarta Kecamatan Pasar Rebo dan jabatan guru kelas pada SLB Negeri 7 Jatinegara. 4. Berkennen dengan hal tersebut pada angka 1 sampai dengan 3, mohon kiranya Ibu Direktur Jenderal berkenan memberikan persetujuan perpindahan unit kerja bagi PPPK Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan, optimisasi kinerja dan ketersediaan formasi guru di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, dengan rincian sebagai berikut :												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama PPPK</th> <th>NIP PPPK</th> <th>Jabatan</th> <th>Unit kerja eksisting</th> <th>Usulan unit kerja baru</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>Fajar Risdyanto</td> <td>1990010212022211012</td> <td>Guru Kelas</td> <td>SDN Utan Kayu Utara 11</td> <td>SLBN 7 Kec. Jatinegara</td> </tr> </tbody> </table>		No	Nama PPPK	NIP PPPK	Jabatan	Unit kerja eksisting	Usulan unit kerja baru	2	Fajar Risdyanto	1990010212022211012	Guru Kelas	SDN Utan Kayu Utara 11	SLBN 7 Kec. Jatinegara
No	Nama PPPK	NIP PPPK	Jabatan	Unit kerja eksisting	Usulan unit kerja baru								
2	Fajar Risdyanto	1990010212022211012	Guru Kelas	SDN Utan Kayu Utara 11	SLBN 7 Kec. Jatinegara								
Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak, saya ucapan terima kasih.  <b>Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta</b> 													
<small>Tambahan :</small> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pt. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta</li> <li>2. Pt. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI</li> <li>3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta</li> <li>4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta</li> </ul>													
<small>Daftar</small> 1. Surat ini dibuat pada tanggal 19 Februari 2024. 2. Dokumen ini telah dikonfirmasi secara elektronik menggunakan sistem SIMB BKKDI.													

**Bagian 6**  
**Tanggapan Persetujuan dari Kementerian  
Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI**

**Bagian 7**  
**Permohonan Badan Kepegawaian Daerah.  
Provinsi DKI Jakarta Ke Kementerian  
Penyadagunaan Aparatur Negara RI**



**Bagian 8**  
**Intruksi Admin PPK Dinas Pendidikan Untuk  
Pelaksananan Tugas Secara Daring Dari Tempat  
Tinggal**

**INSTRUKSI LANGSUNG ADMIN PPPK DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI  
TERKAIT SK PERPINDAHAN UNOR**

The image displays two side-by-side screenshots from a video conferencing platform, likely Zoom. Both screenshots show a video feed of a person speaking, with a small thumbnail of the same video feed visible in the bottom right corner of each frame.

**Screenshot 1 (Left):**

- Header: "P Jajang-Admin PPPK Sudin 1000"
- Date: "7/7/2024"
- Text box:

Sehubungan dengan arahan INC PPPK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, dengan ini dibertahukan bahwa sambil menunggu surat balasan dari kemenpan dan SK perpendidikan unor,  
Mohon untuk melakukan hal dibawah untuk mendukung presensi absen online:

  1. Selalu menyampaikan pemberitahuan kepada seluruh jika ada jadwal kegiatan dari kembiduk terkait kegiatan facilitator
  2. Jika ada jadwal kegiatan facilitator dengan surat tugas wajib untuk melakukan presensi absen online diatas dinas pendidikan provinsi unor dan selalu ada yg berkaitan dengan tugas sebagian facilitator dan bukti foto timbulan manual untuk arisip
  3. Ketika tidak ada jadwal facilitator wajib melaksanakan tugas mengajar menggunakan aplikasi daring dan tetap wajib melaksanakan presensi absen sebanyak 2 kali, yaitu DL AWAL dan DL AKHIR sesuai jadwal yaitu pukul 08.30 s.d. 12.30 WIB VIII (Usahakan momen fotonya ada yg berkaitan dengan tugas mengajar dan selalu ada bukti foto timbulan manual untuk arisip)
  4. Kecuali jika ada surat sakit dari docter hanya melaporkan surat sakit tersebut kepada pihak sekolah serta ditengok bukti timestamp setiap herninya untuk arisip

10:54

**Screenshot 2 (Right):**

- Header: "Koordinasi IPS Digital Learning" and "Info Grup"
- Date: "7/7/2024"
- Text box:

Sehubungan dengan arahan INC PPPK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, dengan ini dibertahukan bahwa sambil menunggu surat balasan dari kemenpan dan SK perpendidikan unor,  
Mohon untuk melakukan hal dibawah untuk mendukung presensi absen online:

  1. Selalu menyampaikan pemberitahuan kepada seluruh jika ada jadwal kegiatan dan kembiduk terkait kegiatan facilitator
  2. Jika ada jadwal kegiatan facilitator dengan surat tugas, wajib untuk melakukan presensi latihan modul atau latihan tugas mengajar menggunakan aplikasi daring dan tetap wajib melaksanakan tugas sebagian dengan tugas mengajar facilitator dan bukti foto timbulan manual untuk arisip
  3. Ketika tidak ada jadwal kegiatan facilitator wajib melaksanakan tugas mengajar menggunakan aplikasi daring dan tetap wajib melaksanakan presensi latihan modul atau latihan tugas mengajar menggunakan aplikasi daring dan selalu ada yg berkaitan dengan tugas mengajar facilitator dan bukti foto timbulan manual untuk arisip
  4. Kecuali jika ada surat sakit dari docter hanya melaporkan surat sakit tersebut kepada pihak sekolah serta ditengok bukti timestamp setiap herninya untuk arisip

10:54

**Sumber:**

**Kepala Satuan Pelaksana SMPN 285 JAKARTA, Admin PPPK Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Pulau Seirbu,  
Disampaikan Pada 07 Juli 2024**

**Bagian Antara 1**  
**Surat Lulus Butuh Dari SMPN 40 Jakarta Pusat**  
**mengetahui Kasatpel Kecamatan**



**Bagian Antara 2**  
**Surat Lulus Butuh Dari SMPN 142 Jakarta Barat**  
**dan Nota Dinas Kasatpel Kecamatan Kembangan**

 PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KUATU BESAR KOTA JAKARTA  
DINAS PENDIDIKAN  
**SMP NEGERI 142 JAKARTA**  


Jalan Jl. Raya Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat Tlp. 5844666, Kode Pos 11640

SURAT KETERANGAN  
Nomor : 0485/073.553/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

nama	:	Dra. Winarni
nip/nk	:	196707281998022001/136442
pangkat/golongan	:	Pembina IV/A
jabatan	:	Kepala Sekolah SMP Negeri 142 Jakarta
unit kerja	:	SMP Negeri 142 Jakarta

Menerangkan bahwa di SMP Negeri 142 Jakarta kekurangan guru mata pelajaran IPS, dikarenakan ada yang Purna Dinas/Pensiun, dengan analisis kebutuhan sebagai berikut :

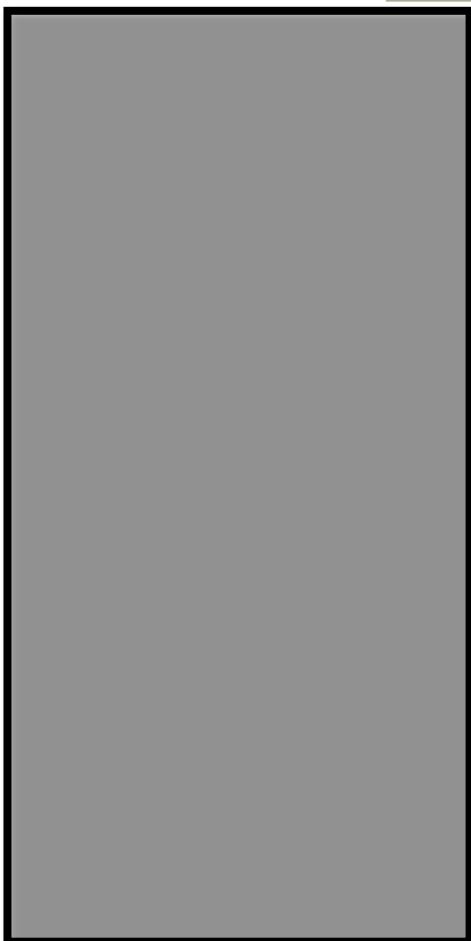
Kelas	Rombel	Jml Jam	Jml Guru	Lebih	Kurang	Keterangan
VIII	8	4	3		1	Satu guru Purna Dinas (Pensiun)
IX	8	4				
Jumlah	24					

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai bahan pertimbangan untuk penyelesaian lebih lanjut.

  
30 November 2022  
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KUATU BESAR KOTA JAKARTA  
DINAS PENDIDIKAN  
**SMP Negeri 142 Jakarta**  
Winarni  
196707281998022001



**Bagian Antara 3**  
**Arahan Kepala Bidang PTK Disdik Untuk Anjab**  
**dan Lolos Butuh Dari SMPN 91 Jakarta Timur**  
**Yang Telah Ditindaklanjuti Kasatpel Jaktim**



**LEMBAR PENGANTAR**

Index	001447	No. urt / kode	01/AL/1/1/2024
Dari	Ady Lesmana	Via	
Kepada	PJ GUBERNUR DKI JAKARTA		
Perihal rencana PERMOHONAN AUDIENSI DAN REKOMENDASI (021-2204-3811237 Ibu Anna Purwa)			
Surat	Surat	Tgl m/t	05 Juni 2024
Perihal		Diterima	Dismimpai
Pengirim			
Surat ini ditandatangani oleh			

Surat ini ditandatangani oleh [Signature]

**Bagian Antara 4**

- Audiensi Ke Gubernur DKI, diterima oleh BKD
- Audiensi Ke Kemenpan diterima PIC
- Audiensi Ke PB PGRI dan PGRI DKI, diterima Wasekjen PB PGRI

Lembar Bukti Tanda Terima Surat Masuk

Asal Surat	Ady Lesmana
Nomor Surat	01/AL/1/1/2024
Perihal	
Ditulis Oleh Petugas	
Diterima Oleh	Ramli
Hari/Tanggal Terima	6-6-2024
Pukul	13.30

C-0234/XG.01.00 16 Mei 2024

**TANDA TERIMA PERSURATAN DPR RI**

SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
Jl. Jendral Gatot Subroto, Serpong, Jakarta  
Telepon : (021) 5715 406

Dari	ADY LESMANA
Kepada	PIPIMPIN KOMISI X DPR RI
Tanggal	06/JUNI/2024
Nama Penerima	NINA

06 JUN 2024

[Signature]

**Referensi:**

1. <https://www.netralnews.com/kisah-perjuangan-guru-pppk-dki-jakarta-untuk-mendapat-kebijakan-relokasi-unit-kerja/VlB0ai9uN1V5eThCM2tka3JzVWhTUT09>
2. <https://www.netralnews.com/terkait-permohonan-relokasi-guru-pppk-telah-digelar-audiensi-di-bkd-dki->
3. <https://www.netralnews.com/guru-pppk-dki-jakarta-pemohon-relokasi-kembangkan-sistem-pembelajaran-digital/bIFmcXQ4Zjg0dDJjWDVTZjVsQ0IIQT09>
4. <https://indonesiaparlemen.com/2024/07/07/perjuangan-guru-pppk-jakarta-cari-kepastian-relokasi-mengajar/>
5. <https://indonesiaparlemen.com/2024/07/27/guru-pppk-yang-berjuang-untuk-relokasi-unit-kerja-kini-diizinkan-mengajar-via-daring/>
6. <https://megapolitan.indonesiaparlemen.com/2024/07/07/cerita-guru-pppk-dki-kesulitan->